

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, JUMLAH  
PENDUDUK DAN IPM TERHADAP PDRB ADHK  
DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2020**

ACC Sup d. ystn  
12/2021  
3



Oleh:

Nama : Daffaliska Azaria Nugraha  
Nomor Mahasiswa : 18313323  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**PRODI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA 2021**

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, JUMLAH  
PENDUDUK DAN IPM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2020**

**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana

jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Daffaliska Azaria Nugraha

Nomor Mahasiswa : 18313323

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



الجمعة الائمة الاندونيسية

**PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, JUMLAH  
PENDUDUK DAN IPM TERHADAP PDRB ADHK**

**DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2020**

**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana

jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Daffaliska Azaria Nugraha

Nomor Mahasiswa : 18313323

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 14 Maret 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing



Prastowo, S.E., M.Ec.Dev.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN  
IPM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI**

Disusun Oleh : **DAFFALISKA AZARIA NUGRAHA**

Nomor Mahasiswa : **18313323**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Rabu, 06 April 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Prastowo,,S.E., M.Ec.Dev.

Penguji : Achmad Tohirin,Drs.,M.A., Ph.D.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## PERSEMBAHAN

Assalamualaikum, Wr.Wb

Puji syukur dan nikmat penulis panjatkan kepada Allah Subahanahu Wa Ta'ala dengan karunia dan ridhonya skripsi ini dapat diselesaikan, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

- Allah Subahanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan meridhoi memberikan nikmat islam dan ilmu kepada penulis.
- Kedua orang tua, Bapak Eka Antasari Nugraha dan Ibu Listiana Agustin Kurniawati yang senantiasa memberikan doa serta dukungan tiada tara kepada penulis.
- Dosen pembimbing, Bapak Prastowo, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Kakak-kakak penulis yang terus memberikan doa dan dukungan penuh untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh kerabat dan teman yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur Alhamdulillahirobbil ‘alamin kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam selalu teracuh kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk Dan IPM Terhadap PDRB ADHK di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2020” di susun sebagai tugas akhir memenuhi syarat mendapat gelar Sarjana jenjang Strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis Selama proses penulisan skripsi ini,penulisd mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan berbagai pihak, secara khusus terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prastowo, S.E., M,Ec.Dev., yang telah memberikan bimbingan dan dukungan terimakasih senantiasa sabar membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua, Bapak Eka Antasari Nugraha dan Ibu Listiana Agustin Kurniawati yang senantiasa memberikan doa serta dukungan tiada tara kepada penulis.
3. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Bapak Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dan Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.S.c., Ph.D selaku Rektor Univeristas Islam Indonesia.
4. Adik Nadirania Alisha Nugraha, dan Adik Safaraz Athalla El Nugraha atas doa dan dukungan penuh yang diberikan kepada penulis.
5. Kepada kerabat dan teman seperjuangan Attala Chaerunisya Puteri, Indah Suci R, Alvico Othmar H, Devandra Ananda S, Danu Firman A, Dzaky Kayungyun,

Hanniyah A, Frista Nunik F, Salma Mahasin N, serta teman-teman satu dosen pembimbing. Atas segala bantuan dan dukungan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 4 Februari 2022

Daffaliska Azaria Nugraha

الجمهورية الإسلامية اندونيسية



## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN UJIAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	7
1.3    Tujuan Penelitian.....	7
1.4    Manfaat Penelitian.....	8
1.5    Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
2.1    Penelitian Terdahulu.....	9
2.2    Kajian Teori.....	13
2.2.1    Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.2.2    Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	15
2.2.3    Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.2.4    IPM dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2.3    Kerangka Pemikiran.....	18
2.4    Hipotesis Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1    Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	20
3.2    Ruang Lingkup Penelitian.....	20
3.3    Metode Pengumpulan Data.....	21
3.4    Definisi Operasional Variabel.....	21

3.5	Metode Analisis .....	22
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....		27
4.1	Deskripsi Data Penelitian .....	27
4.2	Analisis Deskriptif .....	27
4.3	Hasil Analisis Data .....	29
4.3.1	Model Terbaik .....	30
4.4	Pengujian Hipotesis .....	31
4.4.1	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	31
4.4.2	Uji F.....	31
4.4.3	Uji t.....	31
4.5	Pembahasan .....	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		35
5.1	Kesimpulan .....	35
5.2	Saran .....	35
LAMPIRAN.....		40
Lampiran 1 Common effect Model (CEM) .....		40
Lampiran 2 Fixed Effect Model (FEM) .....		41
Lampiran 3 Random Effect Model (REM) .....		42
Lampiran 4 Hausman Test.....		43



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Pustaka .....	11
Tabel 3.1 Definisi Variabel .....	21
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Penelitian .....	27
Tabel 4.2 Hasil Model Terbaik.....	29



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa .....	2
Gambar 1.2 Perbandingan Jumlah Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan lokasi .....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20



## ABSTRAK

Pertumbuhan Ekonomi merepresentasikan seberapa jauh aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pada pendapatan masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah, dengan melihat barang dan jasa riil yang diproduksi pada tahun tertentu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan di Indonesia tidak bisa dilepas dari peran pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam suatu sistem perekonomian negara, yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Alokasi belanja pemerintah akan menghasilkan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama belanja pada modal yang akan menghasilkan barang/jasa lebih banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan model Fixed Effect Model dengan objek penelitian 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dengan rentan waktu 2010-2020. Penelitian ini menghasilkan belanja langsung, belanja tidak langsung, jumlah penduduk dan IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.

***Kata Kunci: PDRB, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Jumlah Penduduk, IPM, dan Data Panel***

## BAB I

### PENDAHULUAN

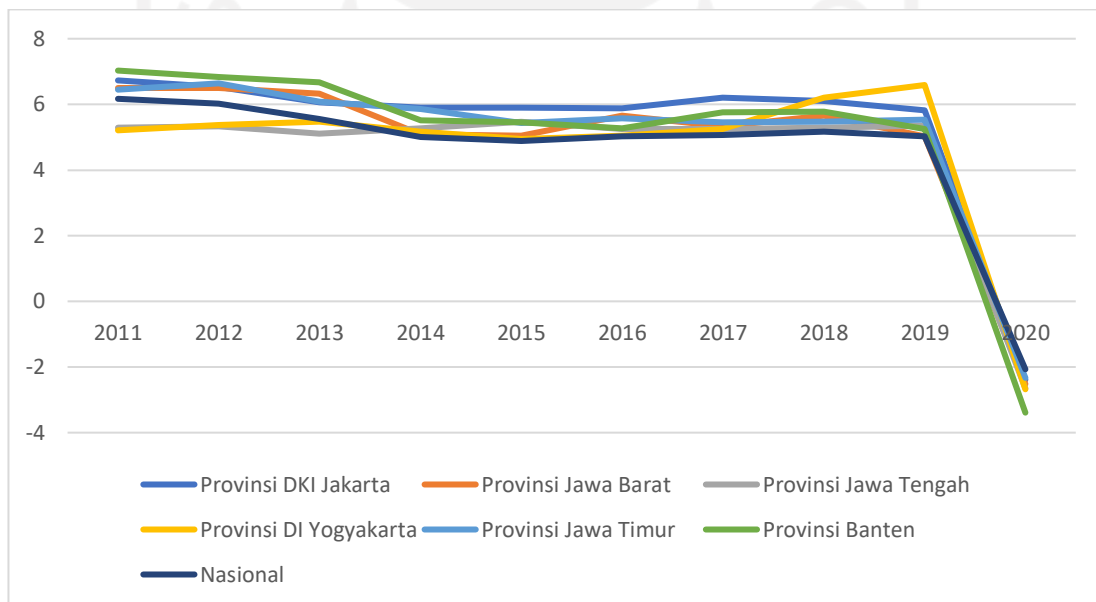
#### 1.1 Latar Belakang

Tujuan dari dilakukannya usaha pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertempat di negara tersebut. Menurut (Todaro, 1977) proses pembangunan merupakan proses yang melibatkan perubahan besar pada struktural ekonomi dan sosial. Hal tersebut mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan juga menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam mencapai tujuan pembangunan, tentu dibutuhkan suatu indikator untuk mengukur pembangunan yang telah dilakukan. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, sebagai dasar untuk mengukur pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda (Sukirno, 2008). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses berkelanjutan yang tujuannya meningkatkan *output* barang dan jasa serta produksi tiap individu dalam jangka panjang. Oleh karena itu secara teori, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka kesejahteraan masyarakatnya pun juga tinggi seiring dengan pertumbuhannya. Meskipun pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dalam mengukur besar perekonomian negara, pertumbuhan ekonomi hanya dapat menggambarkan kondisi produk domestik bruto secara umum dan tidak akurat dalam mencerminkan kemampuan masing-masing individu. Pertumbuhan Ekonomi merepresentasikan seberapa jauh aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pada pendapatan masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah, dengan melihat barang dan jasa riil yang diproduksi pada tahun tertentu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Utami, 2020). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dicerminkan lewat produk domestik bruto (PDB) suatu negara.

Dalam melihat perkembangan besar PDB di Indonesia, Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDB diantara pulau-pulau lainnya

(Haryanto, 2013). Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 tercatat sebesar 58.37%, 58.45%, dan 58.91% berturut-turut dari PDB Nasional berasal dari Pulau Jawa. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 58.75%, dengan provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menyumbang persentase terbesar (BPS, 2022). Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor seperti infrastruktur, ketersediaan sumber daya alam, serta kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi di antara pulau-pulau lainnya. Oleh karena itu, hingga saat ini Pulau Jawa masih menjadi pusat kegiatan perekonomian dan aktivitas pemerintahan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di pulau jawa sudah seharusnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lainnya.



**Gambar 1 .1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa**

Sumber : Laju Pertumbuhan Ekonomi, BPS 2011-2020, data diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 Laju pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2011-2020 menunjukkan angka positif dan fluktuatif, di rentang 4,9-6,2%. Namun, ada penurunan yang signifikan pada tahun 2020, bahkan pertumbuhan ekonomi

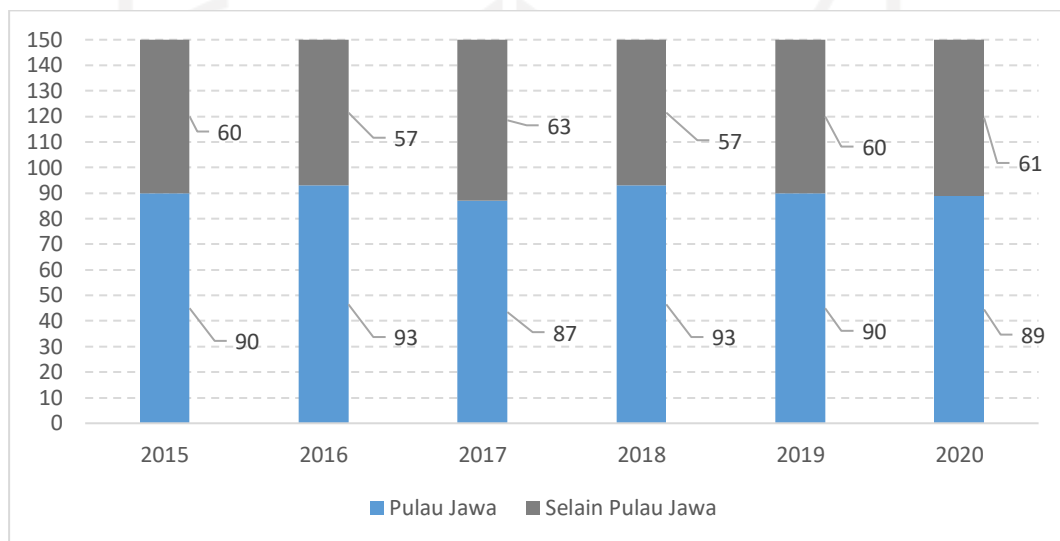
pada lima provinsi di Pulau Jawa mengalami kontraksi cukup dalam, hingga mengakibatkan resesi perekonomian sepanjang tahun 2020. Kondisi ini terjadi akibat adanya pandemi virus Covid-19 di seluruh dunia sehingga berdampak tidak hanya pada perekonomian Indonesia, namun juga menimbulkan dampak luar biasa (extraordinary) terhadap sektor kesehatan, kemanusiaan, perekonomian, dan juga stabilitas sistem keuangan di dunia, tidak terkecuali DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang selama ini menjadi pusat pemerintahan dan sentral bisnis di Indonesia (Bank Indonesia, 2020).

Perencanaan pembangunan di Indonesia tidak bisa dilepas dari peran pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam suatu sistem perekonomian negara, yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pada dasarnya, terdapat 3 lingkup pemerintahan yang menjadi struktural suatu pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintahan yang lebih luas daerah kekuasaannya, memberikan arahan kepada pemerintah yang lebih kecil. Hal tersebut didasari oleh UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai wewenang pemerintah Daerah dan Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang diberikan wewenang untuk melakukan otonomi atas daerahnya sendiri, termasuk pada fungsi pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah, serta menciptakan sistem anggaran tahunan bagi pengeluaran dan pendapatan untuk masing-masing daerah, atau dikenal sebagai sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dalam meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah daerah lewat realisasi belanja pemerintah yang direpresentasikan dalam besaran nilai APBD dapat digunakan seoptimal mungkin untuk dapat melakukan pengadaan barang/jasa baik untuk publik maupun pemerintah sendiri. Pengadaan tersebut dilakukan melalui belanja barang, belanja modal, bantuan sosial serta belanja hibah, untuk menunjang kegiatan operasional dan kegiatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Sesuai dengan konsep ekonomi



makro pembentuk *output* nasional yang dikemukakan oleh Keynes dimana pengeluaran pemerintah akan berimplikasi positif terhadap output yang akan dihasilkan (Azwar, 2016). Alokasi belanja pemerintah tersebut tentu akan menghasilkan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama belanja pada modal yang akan menghasilkan barang/jasa lebih banyak. Dalam melihat perkembangan pengeluaran pemerintah di Indonesia, berikut merupakan data 150 Kabupaten/Kota yang memiliki pengeluaran pemerintah terbesar di Indonesia selama 6 tahun terakhir.



**Gambar 1.2 Perbandingan Jumlah Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan lokasi**

Sumber: APBD, DJKP Kemenkeu RI, 2015-2020, Data diolah

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa 150 Kabupaten/Kota yang memiliki pengeluaran pemerintah terbesar di Indonesia didominasi oleh Kabupaten/Kota yang berlokasi di Pulau Jawa. Jumlah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa adalah sebanyak 113 (tidak termasuk Kabupaten/Kota administratif). Artinya, pada tahun 2017 lebih dari 77% Kabupaten/Kota di Pulau Jawa termasuk pada 150 Kabupaten/Kota dengan pengeluaran pemerintah terbesar di Indonesia.

Pada dasarnya, belanja pemerintah terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan mencakup belanja pegawai untuk gaji, barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung dianggarkan dengan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, mencakup belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung lewat jenis belanja modal menjadi hal penting dikarenakan anggaran bagi keperluan pengadaan infrastruktur termasuk pada belanja modal. Hal tersebut meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, beserta dengan belanja modal fisik lainnya. Sementara belanja tidak langsung diperuntukkan untuk menunjang aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan kewajibannya, seperti halnya pemberdayaan masyarakat.

Sektor pendidikan juga harus menjadi prioritas pemerintah untuk dikembangkan, pasalnya pendidikan merupakan aspek penting bagi sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan kualitas dari sumber dayanya. Akan tetapi, pengeluaran pemerintah yang cenderung kecil tidak akan dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi, begitu pula pengeluaran yang relatif terlalu besar tentunya akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terutama jika sektor yang dialokasikan dana sekian besar bukanlah sektor yang produktif (Hellen et al., 2017). Oleh karena itu, pengelolaan pengeluaran pemerintah haruslah sebaik mungkin sehingga akan turut menghasilkan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat luas.

Berbicara pembangunan tidaklah hanya soal pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga berbicara tentang sumber daya manusia yang bertempat di lokasi tersebut. Menurut Smith (1776), mengatakan bahwa *output* perekonomian sangatlah dipengaruhi oleh faktor ketenagakerjaan, dimana semakin tinggi jumlah penduduk dan kualitas tenaga kerja dari suatu negara akan turut meningkatkan kuantitas produksi dan juga dapat mempersingkat waktu produksi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dari sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang terdiri atas perhitungan

mencakup unsur kesehatan, pendidikan, dan juga pengeluaran. IPM memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, dikarenakan penduduk merupakan salah satu faktor paling penting dalam produksi. Hal itu dikarenakan, dengan semakin tingginya mutu penduduk akan mendorong para tenaga kerja untuk melakukan inovasi dalam rangka memaksimalkan sumber daya dan faktor-faktor produksi lainnya (Susanto & Rahmawati Lucky, 2013). Menurut Cooray dalam (Digdowiseiso, 2021), penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah akan lebih mudah dalam mengatasi hambatan seperti tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan sebagaimana yang dipaparkan dalam teori sumber daya manusia.

Didalam upaya untuk menuju kesejahteraan masyarakat yang tinggi, timbul hambatan dan juga tantangan dalam melakukan pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah kemiskinan. Sebagai negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk ketiga terbanyak di dunia, Indonesia termasuk salah satu dari banyak negara yang memiliki permasalahan dalam mengontrol jumlah penduduknya. Hal itu dikarenakan, ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia produktif menimbulkan pengangguran, rendahnya kualitas Pendidikan di Indonesia, dan juga pembangunan yang kurang merata.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja langsung dan tidak langsung dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan mempertimbangkan Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa sebagai variabel kontrolnya. Disini, peneliti tertarik untuk menilai pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa, lewat realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Alasan peneliti memilih objek penelitian pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa adalah dikarenakan anggaran belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten/Kota di Pulau Jawa berbeda pada setiap daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan latar belakang beserta potensi pengembangan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang berbeda-beda di setiap

kabupaten/kota. Maka dari itu, dapat dilihat apakah belanja pemerintah lewat belanja langsung dan tidak langsungnya dapat menjadi stimulus terhadap output perekonomian kabupaten/kota atau tidak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka beberapa rumusan masalah yang digunakan didalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengaruh Belanja Langsung terhadap PDRB pada tingkat Kabupaten/Kota pada Provinsi yang terletak di Pulau Jawa tahun 2010-2020?
2. Apakah pengaruh Belanja tidak Langsung terhadap PDRB pada tingkat Kabupaten/Kota pada Provinsi yang terletak di Pulau Jawa tahun 2010-2020?
3. Apakah pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PDRB pada tingkat Kabupaten/Kota pada Provinsi yang terletak di Pulau Jawa tahun 2010-2020?
4. Apakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB pada tingkat Kabupaten/Kota pada Provinsi yang terletak di Pulau Jawa tahun 2010-2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis besar pengaruh Belanja Langsung terhadap PDRB pada tingkat Kabupaten/Kota pada Provinsi yang terletak di Pulau Jawa tahun 2010-2020.
2. Untuk menganalisis besar pengaruh Belanja tidak Langsung terhadap PDRB pada tingkat Kabupaten/Kota pada Provinsi yang terletak di Pulau Jawa tahun 2010-2020.
3. Untuk menganalisis besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PDRB pada tingkat Kabupaten/Kota pada Provinsi yang terletak di Pulau Jawa tahun 2010-2020.
4. Untuk menganalisis besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB pada tingkat Kabupaten/Kota pada Provinsi yang terletak di Pulau Jawa tahun 2010-2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Menambah wawasan mengenai peranan belanja langsung dan tidak langsung, IPM, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Menjadi bahan kritikan ataupun saran terhadap pemerintah daerah, dan memberikan arahan untuk menuju pembangunan daerah serta memberikan dampak positif bagi tingkat perekonomian di Pulau Jawa
3. Mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam kebijakan yang berlaku sebagai upaya turut mendukung pembangunan ekonomi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori**

Bab ini memuat kajian pustaka, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipoteses penelitian.

##### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan jenis dan cara pengumpulan data, variabel-variabel data dan metode analisis data.

##### **Bab IV : Analisis dan Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai data yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang ditentukan berdasarkan alat analisis dan membawa ke tujuan dan sasaran penelitian.

##### **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya, dimana penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan referensi penting bagi penelitian yang sedang berlangsung. Penelitian yang dilakukan oleh (Haryanto, 2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mendapatkan hasil bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial begitu pun secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Adapun penelitian serupa dilakukan oleh (Kaat et al., 2019) untuk mengetahui bagaimana belanja langsung dan belanja tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi beserta andilnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Utara mendapatkan hasil bahwa belanja langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung. Akan tetapi, belanja tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian lain telah dilakukan oleh (Ratno, 2020) di Pulau Jawa, tepatnya pada kawasan Solo Raya di Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Tidak Langsung serta Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Solo Raya. Di Kawasan Solo Raya, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya secara positif dan tidak signifikan. Akan tetapi, pada Belanja Tidak Langsung tahun 2020 dan dua tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Solo Raya. Variabel Belanja Langsung juga mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi pada tahun sebelumnya secara positif dan signifikan. Namun, Belanja Langsung pada tahun 2020 dan dua tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Solo Raya.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Muafiqie, 2015) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan dengan hasil bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Akan tetapi, belanja langsung dan tidak langsung secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Dalam mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi, penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh (Fitri Yenny & Anwar, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah regresi linier sederhana dikarenakan penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen saja, yaitu Jumlah Penduduk. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Susanto & Rahmawati Lucky, 2013; Utami, 2020) pengaruh IPM terhadap pertumbuhan Ekonomi dikaji dengan variabel kontrol yang berbeda. Penelitian Utami (2020), bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari IPM, kemiskinan, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dan didapatkan hasil bahwa IPM, Kemiskinan, dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian oleh Susanto dan Rahmawati Lucky bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari IPM, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode regresi *Ordinary Least Square* (OLS) dan didapatkan hasil bahwa IPM dan Inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berikut tabel penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

**Tabel 2.1 Kajian Pustaka**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>
1	Tommy Prio Haryanto (2013)	Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung	Regresi Data Panel	Belanja Lngsung dan Tidak Langsung berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah
2	Marsye H. Kaat, Paulus Kindangen, Debby Ch. Rotinsulu (2019)	Belanja Langsung, belanja tidak langsung, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan	Analisis Jalur Regresi Data Panel	Belanja Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Belanja Tidak Langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pengentasan kemiskinan
3	Fernaldi Anggadha Ratno (2020)	Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah	Regresi data panel	Belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Humaidah Muafiqie (2015)	Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan	Analisis jalur Regresi Data Panel	Belanja Langsung dan Tidak Langsung secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara parsial, belanja langsung dan tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan lewat pertumbuhan ekonomi



5	Nanda Fitri Yenny, Khairil Anwar (2020)	Jumlah Penduduk Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Sederhana	Jumlah Penduduk tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
6	Christiawan Eka Arianto, Sonny Sumarsono, M. Adenan (2015)	Jumlah Penduduk Pengangguran	Regresi Linier Berganda	Jumlah Penduduk Berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
7	Farathika Putri Utami (2020)	IPM Kemiskinan Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
8	Aris Budi Susanto, Lucky Rahmawati (2013)	IPM Inflasi Pertumbuhan Ekonomi	Regresi OLS	IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Penelitian ini merujuk pada penelitian oleh Haryanto (2013) yang dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dirujuk adalah penulis menggunakan beberapa variabel tidak terikat lain seperti halnya jumlah penduduk, dan IPM. Berikutnya, variabel Jumlah Penduduk merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Arianto dkk., 2015) yang dilakukan pada Kabupaten Jember dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Hal tersebut

dikarenakan setiap adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Jember, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel IPM merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Susanto & Lucky, 2013) yang dilakukan di Kabupaten Lamongan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan dengan setiap ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, akan berimplikasi positif terhadap produktivitas sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya merupakan suatu indikator untuk mengukur perubahan yang terjadi pada perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu ke periode waktu lainnya. Menurut (Kuznets, 1973), pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam jangka panjang dari kapasitas barang yang akan disediakan kepada para masyarakatnya dengan diiringi oleh adanya perubahan ideologi serta structural kelembagaan yang terjadi.

Didalam pengukurannya, suatu perekonomian dapat dikatakan tumbuh jika ada kenaikan output agregat produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu negara ataupun daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari besar Produk Domestik Bruto (PDB) untuk cakupan nasional, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk cakupan regional. Dalam penghitungannya, laju pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut :

$$G = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

Dimana

G : Pertumbuhan Ekonomi

$Y_t$  : Produk Domestik Bruto periode tertentu

$Y_{t-1}$  : Produk Domestik Bruto periode sebelumnya

Rumus perhitungan laju pertumbuhan ekonomi diatas berlaku sama bagi perhitungan laju pertumbuhan ekonomi daerah, hanya saja variable Y digantikan dengan PDRB selaku tolak ukur yang digunakan dalam cakupan regional. Pertumbuhan ekonomi daerah merepresentasikan kondisi perekonomian daerah, dimana dengan segala tantangan dan juga hambatan masih bisa tumbuh atau mengalami stagnan[si, bahkan penurunan. Dengan tumbuhnya perekonomian juga, dapat diasumsikan akan berdampak positif kepada daerah tersebut, dimana dengan tumbuhnya perekonomian daerah akan menyebabkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk yang bertempat tinggal di daerah tersebut, maupun penduduk di sekitarnya. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk, akan turut membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial-ekonomi seperti masalah pengangguran, bahkan kemiskinan.

Pada teori pertumbuhan Keynesian yang mengacu pada pemikiran oleh J.M Keynes, peningkatan pengeluaran individu dalam perekonomian akan meningkatkan pendapatan secara agregat. Dalam (Mankiw & Ball, 2011), besar output nasional yang dihasilkan oleh suatu negara di tentukan oleh faktor-faktor pengeluaran seperti halnya konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga besar ekspor beserta impor suatu negara. Oleh karena itu, terbentuklah model pertumbuhan ekonomi Keynes yang kemudian dikenal juga sebagai identitas pendapatan nasional dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana

Y = Pertumbuhan Ekonomi

C = Tingkat Konsumsi Rumah Tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

### **2.2.2 Pengeluaran Pemerintah dengan PDRB**

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan besar pengeluaran yang dikeluarkan oleh structural pemerintah daerah dalam memenuhi kepentingan publik di daerahnya. Pengeluaran tersebut dibelanjakan untuk menunjang kebutuhan publik akan Pendidikan, kesehatan, keamanan, sarana dan prasarana publik beserta kebutuhan pemerintah itu sendiri seperti halnya gaji pegawai institusi pemerintahan, dan infrastruktur yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam aliran Keynesian, pengeluaran pemerintah adalah salah satu faktor penentu besar output yang akan dihasilkan oleh suatu negara.

Tingkat aktivitas perekonomian oleh suatu negara dipengaruhi oleh pengeluaran agregatnya. Apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan agregat akan semakin tinggi. Selain itu, peran pengeluaran pemerintah pada negara berkembang sangatlah signifikan jika dilihat dari kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas, Oleh karena itu peranan pemerintah sangatlah penting. Peningkatan permintaan agregat artinya pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan, hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi diukur dari PDB maka peningkatan pertumbuhan berarti peningkatan pendapatan (Mankiw, 2011).

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 yang dikutip dari (Farel Maga et al., 2016). Pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

#### **a. Belanja Langsung**

Dalam Permendagri No.13 tahun 2006 dikatakan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung terkait dengan kebijakan dan program dari Pemerintah daerah, tepatnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

**b. Belanja Tidak Langsung**

Dalam Permendagri No.13 tahun 2006 dikatakan bahwa belanja tidak langsung merupakan anggaran belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan kebijakan dan program, seperti halnya belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pada provinsi atau kabupaten/kota serta pemerintah desa, belanja bantuan keuangan serta belanja tak terduga.

Pada model pertumbuhan Keynes, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif pada besar pendapatan nasional suatu negara. Menurut Keynes, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui adanya peningkatan pendapatan nasional, diperlukan peningkatan konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan juga net ekspor. Peran pengeluaran pemerintah sangatlah krusial didalam perekonomian, terutama pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Menurut (Pratama & Utama, 2019), pemerintah daerah lewat pengeluarannya harus berperan aktif untuk mengatur dan mengembangkan sektor publik sebagai upaya turut merangsang kegiatan perekonomian agar efisiensi pasar dapat terjadi.

Pengeluaran pemerintah yang di alokasikan terhadap pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh terhadap besar jumlah produksi barang dan jasa secara langsung. Pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan pada sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian (Azwar, 2016). Hal itu dikarenakan, pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat, sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai instrumen pemerintah, terutama lewat desentralisasi fiskalnya dimaksudkan agar realisasi pengeluaran yang dialokasikan tepat sasaran, sehingga mampu untuk mencapai stabilitas sistem perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh.

### 2.2.3 Jumlah Penduduk dengan PDRB

Penduduk merupakan semua individu yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut (BPS, 2020), penduduk merupakan semua individu yang bertempat tinggal di suatu tempat selama 6 bulan atau lebih dan yang bertempat tinggal selama kurang dari 6 bulan namun memiliki tujuan untuk menetap di wilayah tersebut.

Dalam ekonomi klasik oleh (Smith, 1776), dijelaskan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk yang tinggi akan mampu untuk mendorong tingkat output yang lebih tinggi pula. Hal tersebut berlaku apabila penambahan penduduk diiringi dengan adanya peningkatan teknologi dan juga produksi yang menggunakan skala ekonomi (*Economies of Scale*). Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja aktif pada periode waktu tertentu sehingga suatu negara akan mampu untuk mendapatkan bonus demografi yang mampu mendorong pertumbuhan output suatu negara.

Akan tetapi, penambahan penduduk yang tidak diiringi dengan kondisi perekonomian yang memadai justru akan memperparah kondisi dan menambah permasalahan-permasalahan dalam perekonomian, seperti halnya pengangguran, dan kemiskinan yang malah akan menciptakan ketidakstabilan dalam perekonomian (Mahdawi dkk., 2021). Dalam penelitian (Pancawati, 2000), dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang memiliki tekanan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah negatif. Hal tersebut sesuai dengan kekhawatiran yang dijelaskan Thomas R. Malthus, dimana pada kondisi pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diiringi penambahan pada modal dapat menurunkan tingkat output per kapita (Widarjono, 1999).

### 2.2.4 IPM dengan PDRB

Dalam melihat dampak dari pembangunan yang terjadi, aspek yang perlu diperhatikan tidak dapat dilihat dari aspek perekonomiannya saja, namun juga diperlukannya aspek sosial. Hal tersebut dikarenakan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena

itu, diperlukan adanya indikator lain dalam mengukur aspek-aspek sosial beserta tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

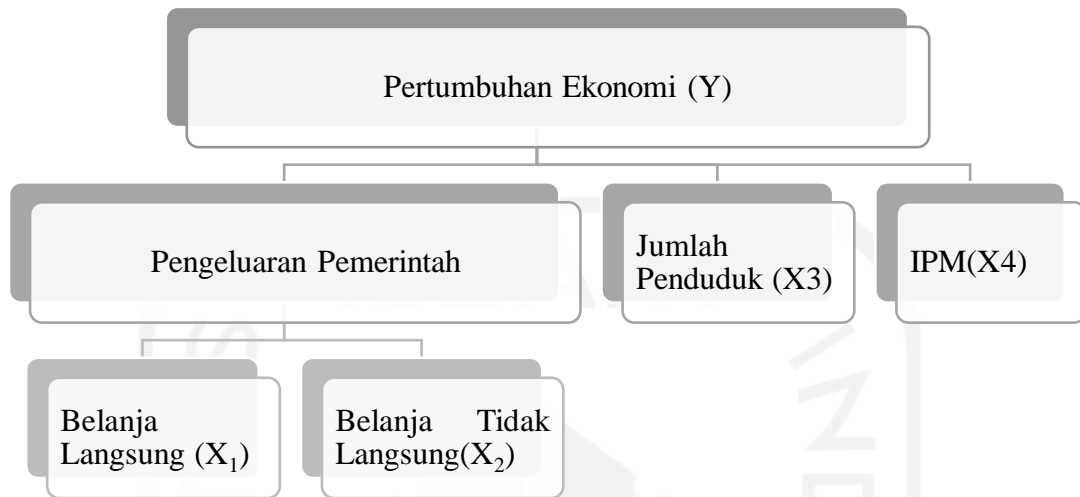
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu metode pengukuran dalam menilai capaian pembangunan manusia melalui adanya perhitungan indeks komposit yang mencakup tiga aspek dasar dalam menilai standar kualitas hidup dan pembangunan manusia yang dilakukan (BPS, 2021).

Tiga aspek tersebut adalah, angka harapan hidup yang merepresentasikan komponen kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang merepresentasikan komponen pendidikan atau pengetahuan, dan Produk Nasional Bruto per Kapita (PNB per Kapita) yang mencerminkan komponen pengeluaran sebagai dasar bahwa masyarakat mendapatkan standar hidup yang layak. Nilai IPM berada pada rentang 0-100, dimana semakin tinggi setiap komponen yang membentuk IPM, maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

IPM memiliki keterkaitan serta peranan penting kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (Todaro, M. P., & Smith : 59,2011). Sebagai faktor produksi, kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan oleh IPM menggambarkan keterampilan serta kemampuan individu dalam menghasilkan barang dan jasa (Ranis, 2004).

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat dibuat kerangka pemikirin untuk penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran sebagaimana dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Diduga Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap PDRB pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.
2. Diduga Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap PDRB pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.
3. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap PDRB pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.
4. Diduga IPM berpengaruh positif terhadap PDRB pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan data statistik yang ada dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan merupakan gabungan antara data *cross section* pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan data *time series* dengan kurun waktu kurang lebih sebelas tahun pada tahun 2010-2020. Data tersebut berupa PDRB Harga Konstan 2010, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Jumlah Penduduk, dan IPM. Data tersebut dikumpulkan melalui data yang disediakan dan dirilis kepada publik oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJKP Kementerian Keuangan Republik Indonesia), dan Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional Badan Pembangunan Nasional (SIMREG BAPPENAS). Data yang diperoleh kemudian diolah secara kuantitatif dan dianalisis menggunakan metode regresi data panel.

#### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat kecuali Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten. Bagi 5 Kabupaten/Kota yang secara administratif termasuk kedalam wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Pusat, dan Kota Administratif Jakarta Selatan, beserta Kabupaten Pangandaran yang termasuk pada wilayah Provinsi Jawa Barat tidak diikutsertakan di dalam penelitian ini dikarenakan adanya kekurangan pada ketersediaan data.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data yang diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (DJKP-Kemenkeu), dan SIMREG BAPPENAS dalam kurun waktu 2010-2020.

Adapun data yang diperlukan:

1. Data PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.
2. Data pengeluaran pemerintah lewat realisasi belanja langsung pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.
3. Data pengeluaran pemerintah lewat realisasi belanja tidak langsung pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.
4. Data jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.
5. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan variabel yang membentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh tentang informasi tersebut, kemudian ditarik atau diberi kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*) yaitu:

**Tabel 3.1 Definisi Variabel**

Model	Variabel	Ukuran	Sumber

<b><math>\beta_1BL</math></b>	Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa	DJPK Keuangan RI Kementrian
<b><math>\beta_2BTL</math></b>	Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa	DJPK Keuangan RI Kementrian
<b><math>\beta_3POP</math></b>	Penduduk	Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa	SIMREG BAPPENAS
<b><math>\beta_4IPM</math></b>	Kesejahteraan Masyarakat	IPM pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa	BPS, BAPPENAS SIMREG
<b><math>\gamma_{PDRB}</math></b>	PDRB ADHK 2010	PDRB atas harga konstan tahun 2010 pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa	BPS

### 3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data panel. Data panel adalah kombinasi antara data *time series* dengan *cross-section*. Data panel dipilih dikarenakan dengan semakin banyaknya jumlah observasi yang berhasil, maka dapat mengatasi masalah yang timbul akibat adanya keterbatasan jumlah data pada data *time series*. Keuntungan dari data panel menurut (Widarjono, 2009), dengan jumlah data yang lebih banyak maka *degree of freedom* dari data akan lebih besar. Selain itu, dengan data panel dapat mengatasi masalah yang timbul akibat adanya penghilangan variabel. Sedangkan menurut Baltagi dalam (Gujarati, 2004), data panel memiliki kecocokan dalam mengamati adanya perubahan pada variabel yang dinilai dinamis, serta dapat menunjukkan lebih banyak informasi didalamnya.

### 3.5.1 Model Analisis

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$PDRB = f (BL, BTL, POP, IPM)$$

Sehingga model diatas dapat diuraikan kedalam model ekonometrika dengan bentuk sebagai berikut :

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 BL_{it} + \beta_2 BTL_{it} + \beta_3 Pop_{it} + \beta_4 IPM_{it} + e_{it}$$

Dimana :

PDRB	= PDRB ADHK Tahun Dasar 2010
BL	= Realisasi Belanja Langsung
BTL	= Realisasi Belanja Tidak Langsung
Pop	= Jumlah Penduduk
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
$\beta_{(1,2,3,4)}$	= Koefisien Regresi
$\beta_0$	= Intercept/Konstanta
e	= Error Term
I	= Kabupaten/Kota (1, 2, ..., 112)
t	= Waktu (2010, 2011, ..., 2020)

### 3.5.2 Estimasi Regresi Data Panel

Metode Estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

a. *Common Effect Model (CEM)*

Pada common effect model, adanya perbedaan individu dan waktu sepenuhnya tidak dianggap atau diabaikan, Oleh karena itu, perilaku data dari setiap individu sama dalam berbagai periode waktu. Pengkombinasian data cross section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu

(Widarjono, 2005). CEM dapat disebut juga sebagai metode Ordinary Least Square (OLS).

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Pendekatan dengan *fixed effect model* menyebabkan slope tetap sama dengan intercept yang berbeda antar subjek. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, data panel melibatkan variabel dummy didalamnya sehingga akan memperbolehkan perbedaan antar nilai parameter (Widarjono, 2005).

c. *Random Effect Model (REM)*

Dalam penggunaan REM, model harus memiliki jumlah *cross section* yang lebih besar dibandingkan jumlah variabelnya serta objeknya harus lebih besar dibandingkan dengan koefisiennya. Menurut (Widarjono, 2005), REM digunakan untuk memperbaiki kelemahan dari model FEM (dummy). Penggunaan REM juga dapat menghilangkan permasalahan heterokedastisitas dari data yang digunakan. Model ini disebut juga sebagai Generalized Least Square (GLS).

### 3.5.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang tepat dalam pengolahan data panel, terdapat pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:

a. *Chow Test*

Dalam menentukan model paling baik yang akan digunakan dalam estimasi data panel antara *fixed effect* dengan *common effect*, uji chow digunakan untuk memilih mana model yang lebih baik antara keduanya. Berikut merupakan hipotesis didalam Uji Chow :

$H_0$  : Menerima CEM

$H_a$  : Menerima FEM

b. *Hausman Test*

Dalam menentukan model paling baik yang akan digunakan dalam estimasi data panel antara *fixed effect* dengan *random effect*, uji hausman digunakan untuk memilih mana model yang lebih baik antara keduanya. Berikut merupakan hipotesis didalam Uji Hausman :

$H_0$ : Menerima *REM*

$H_a$ : Menerima *FEM*

c. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Dalam menentukan model paling baik yang akan digunakan dalam estimasi data panel antara *random effect* (GLS) dengan *common effect* (OLS), uji LM digunakan untuk memilih mana model yang lebih baik. Berikut merupakan hipotesis didalam Uji Hausman

$H_0$ : Menerima *Common Effect*

$H_a$ : Menerima *Random Effect*

### 3.5.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan besar pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Koefisien determinasi menunjukkan pengaruh dalam rentang 0-1 ( $0 < R < 1$ ), yang mana jika nilainya semakin mendekati 1, maka variabel independen secara bersama-sama memberikan penjelasan tentang variabel dependen terkait yang diteliti. Adapun Adjusted  $R^2$  digunakan untuk mengatasi bias yang muncul sebagai akibat dari penambahan variabel bebas.

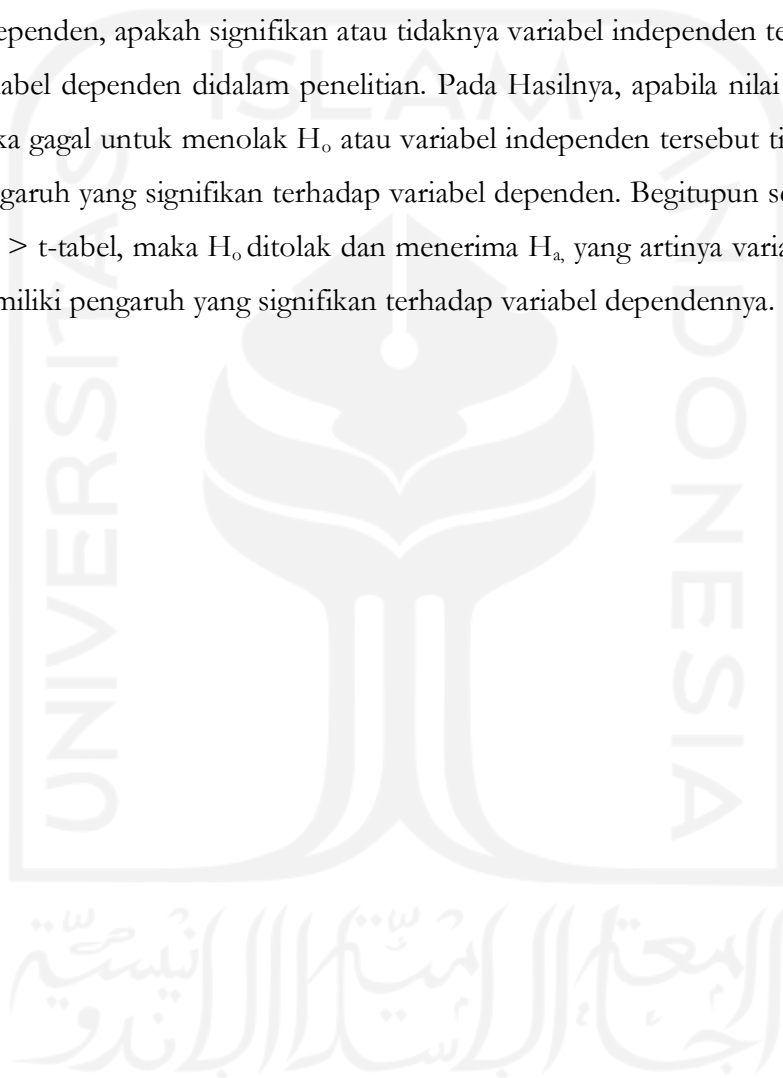
2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya variabel independen secara menyeluruh dalam mempengaruhi variabel dependen didalam suatu penelitian. Pada hasilnya, apabila nilai  $F\text{-stat} > F\text{-kritis}$  maka menerima hipotesis alternatif atau variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal tersebut berlaku sebaliknya, dimana jika  $F\text{-stat} < F\text{-kritis}$  maka menerima hipotesis nol atau variabel independen secara bersama-sama tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen, apakah signifikan atau tidaknya variabel independen tersebut terhadap variabel dependen didalam penelitian. Pada Hasilnya, apabila nilai  $t\text{-stat} < t\text{-tabel}$ , maka gagal untuk menolak  $H_0$ , atau variabel independen tersebut tidaklah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Begitupun sebaliknya, jika  $t\text{-stat} > t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , yang artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.



## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data panel yang mana merupakan data gabungan antara data *time series* (runtut waktu) dan data *cross section* (silang). Data *time series* yang digunakan merupakan data kurun waktu tahun 2010-2020 dan data *cross section* yang digunakan merupakan data dari 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Variabel terikat yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi dengan *proxy* PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (**PDRB**), sedangkan variabel bebas yang digunakan terdiri atas Pengeluaran Pemerintah dengan *proxy* Belanja Langsung (**BL**) dan Belanja Tidak Langsung (**BTL**) Kabupaten/Kota, Jumlah Penduduk (**Pop**) Kabupaten/Kota, dan Indeks Pembangunan Manusia (**IPM**) Kabupaten/Kota. Adapun alat bantu berupa perangkat lunak/*Software* yang digunakan dalam prosesi olah dan analisis data pada penelitian ini adalah *Excel, Stata 14.0*.

#### 4.2 Analisis Deskriptif

Berikut merupakan hasil statistik deskriptif dari penelitian ini :

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif Penelitian

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
<b>PDRB</b>	1,232	34066.05	43930.95	2026	410879
<b>BL</b>	1,232	1032.607	725.5541	170	7673
<b>BTL</b>	1,232	1121.667	605.1878	117	3673
<b>Pop</b>	1,232	1198811	826428.4	17201	6088233
<b>IPM</b>	1,232	69.71158	5.667104	54.49	86.65

Sumber : Diolah menggunakan *STATA 14.0*



Dari data diatas, didapatkan hasil bahwa variabel PDRB memiliki observasi sebanyak 1,232 data dengan nilai rata-rata (*mean*) pertumbuhan PDRB ADHK pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020 sebesar 34066.05 dan standar deviasi sebesar 43930.95. Besar nilai minimum PDRB adalah 2026 serta nilai maksimumnya sebesar 410879. Nilai rata-rata yang ditunjukkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata besar PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020 adalah sebesar 34.006,05 miliar Rupiah atau Rp.34 Trilliun. Sedangkan standar deviasi senilai 43930.95 menunjukkan persebaran data pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai *mean* ( $\sigma > \bar{X}$ ) berarti bahwa penyimpangan pada data lebih dari rata-ratanya. Hal tersebut mencerminkan bahwa nilai *mean* merupakan representasi yang buruk bagi keseluruhan data.

Belanja langsung Kabupaten/Kota (BL) memiliki observasi sebanyak 1,232 data dengan nilai rata-rata (*mean*) pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020 sebesar 1032.607 dan standar deviasi sebesar 725.5541. Besar nilai minimum BL adalah 170 serta nilai maksimumnya sebesar 7673. Nilai rata-rata yang ditunjukkan pada **Tabel 4.1** menunjukkan bahwa rata-rata nilai belanja langsung pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020 adalah sebesar 1032.607 miliar Rupiah atau Rp.1.032,607 Trilliun. Sedangkan standar deviasi senilai Rp. 725.5541 menunjukkan persebaran data Belanja Langsung pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.

Belanja tidak langsung Kabupaten/Kota (BTL) memiliki observasi sebanyak 1,232 data dengan nilai rata-rata (*mean*) pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020 sebesar 1121.667 dan standar deviasi sebesar 605.1878. Besar nilai minimum BTL adalah 117 serta nilai maksimumnya sebesar 3673. Nilai rata-rata yang ditunjukkan pada tabel **4.1** menunjukkan bahwa rata-rata nilai belanja tidak langsung pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020 adalah sebesar 1121.667 miliar Rupiah atau Rp.1,032 Trilliun. Sedangkan standar deviasi senilai Rp. 605.1878 menunjukkan persebaran data Belanja tidak langsung pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (POP) memiliki observasi sebanyak 1,232 data dengan nilai rata-rata (*mean*) pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020 sebesar 1198811 dan standar deviasi sebesar 826428.4. Besar nilai minimum POP adalah 17201 serta nilai maksimumnya sebesar 6088233. Nilai rata-rata yang ditunjukkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata nilai jumlah penduduk pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020 adalah sebesar 1.198.811 orang. Sedangkan standar deviasi sebesar 826.428,4 menunjukkan persebaran data Jumlah Penduduk pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota (IPM) memiliki observasi sebanyak 1,232 data dengan nilai rata-rata (*mean*) pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020 sebesar 69.71158 dan standar deviasi sebesar 5.667104. Besar nilai minimum IPM adalah 54.49 serta nilai maksimumnya sebesar 86.65. Nilai rata-rata yang ditunjukkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata nilai indeks pembangunan manusia pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020 adalah sebesar 69,71158. Sedangkan standar deviasi sebesar 5.667104 menunjukkan persebaran data IPM pada 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2010-2020.

### 4.3 Hasil Analisis Data

Berikut merupakan hasil uji Fixed Effect Model dengan hasil uji Hausman, dan uji Chow.

Tabel 4.2

Variabel	FE		
	Coef	T-Stat	Prob.
<b>C</b>	-12.31286	-24.05	0.000
<b>LOG BL</b>	.0321203	4.67	0.000
<b>LOG BTL</b>	.0063139	0.85	0,396
<b>LOG Pop</b>	.0349058	2.09	0,037
<b>LOG IPM</b>	5.084529	40.26	0.000

<b>Hausman Test</b>	219.59	Fixed Effect
<b>Chow Test</b>	388.61	Fixed Effect
<b>F-Stat</b>	1057.49	
<b>R-Square</b>	0.1144	

Sumber : Data diolah dengan Stata 14.

Dalam menentukan model regresi terbaik yang akan digunakan, dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk memilih model antara *common effect model* atau *fixed effect model*. Sedangkan Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara *random effect model* atau *fixed effect model*. Pada **tabel 4.2**, didapatkan hasil model terbaik untuk penelitian ini adalah Fixed Effect Model.

#### 4.3.1 Model Terbaik

Berdasarkan hasil fixed effect model diatas, dapat dituliskan persamaannya dengan:

$$LOG PDRB_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 LOGBL_{it} + \beta_2 LOGBTL_{it} + \beta_3 LOGPop_{it} + \beta_4 IPM_{it} + e_{it}$$

$$LOG PDRB_{it} = -12.31286 + .0321203LOGBL_{it} + .0063139LOGBTL_{it} + .0349058LOGPop_{it} + 5.084529\beta_4 IPM_{it} + e_{it}$$

Dimana

PDRB = PDRB ADHK Tahun Dasar 2010

BL = Realisasi Belanja Langsung

BTL = Realisasi Belanja Tidak Langsung

Pop = Jumlah Penduduk

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

$\beta_{(1,2,3,4)}$  = Koefisien Regresi

$\beta_0$  = Intercept/Konstanta

- e = Error Term  
i = Kabupaten/Kota (1, 2, ..., 112)  
t = Waktu (2010, 201, ..., 2020)

#### 4.4 Pengujian Hipotesis

##### 4.4.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan tabel hasil uji regresi Fixed Effect Model, ditunjukkan koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0.1144 (11.44%) atau dapat diartikan bahwa variabel belanja langsung, belanja tidak langsung, jumlah penduduk, dan IPM memiliki pengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi sebesar 11.44%. Sedangkan 88.56% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

##### 4.4.2 Uji F

Berdasarkan tabel hasil uji regresi Fixed Effect Model, didapatkan nilai F hitung sebesar 1057,49 serta ditunjukkan besar nilai F kritis untuk *degree of freedom* 4 dan 1116 adalah 2,379. Maka kita menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ , oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel PDRB ADHK, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Jumlah Penduduk, dan IPM secara simultan dan signifikan.

##### 4.4.3 Uji t

Dengan jumlah observasi sebesar 1.232 dengan *degree of freedom* lebih dari 120 dan  $\alpha$  sebesar 0.05 maka nilai t tabel sebesar 1.960, maka hasil uji t untuk variabel Belanja Langsung,  $H_0$  nya adalah variabel belanja langsung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan  $H_a$  nya adalah belanja langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan jumlah observasi sebanyak 1,232, didapatkan t hitung sebesar 4.67 dan t tabel untuk df lebih dari 120 adalah 1.960 ( $t\text{-stat} > t\text{-tabel}$ ). Oleh karena itu, kita menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja langsung Kabupaten/Kota di Pulau Jawa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 112 Kabupaten/Kota di Pulau

Jawa. Nilai koefisien sebesar 0.0321203 menunjukkan bahwa jika belanja langsung naik sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0.0321203%.

Hasil uji t untuk variabel belanja tidak langsung,  $H_0$  nya adalah variabel belanja tidak langsung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan  $H_a$  nya adalah belanja tidak langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan jumlah observasi sebanyak 1,232, didapatkan t hitung sebesar 0.85 dan t tabel untuk df lebih dari 120 adalah 1.960 ( $t\text{-stat} < t\text{-tabel}$ ). Oleh karena itu, kita menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja langsung Kabupaten/Kota berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.

Hasil uji t untuk variabel jumlah penduduk,  $H_0$  nya adalah variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan  $H_a$  nya adalah jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan jumlah observasi sebanyak 1,232, didapatkan t hitung sebesar 2.09 dan t tabel untuk df lebih dari 120 adalah 1.960 ( $t\text{-stat} > t\text{-tabel}$ ). Oleh karena itu, kita menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Nilai koefisien sebesar 0.0349058 menunjukkan bahwa, jika jumlah penduduk naik sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0.0349058%.

Hasil uji t untuk variabel IPM,  $H_0$  nya adalah variabel IPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan  $H_a$  nya adalah IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan jumlah observasi sebanyak 1,232, didapatkan t hitung sebesar 40.26 dan t tabel untuk df lebih dari 120 adalah 1.960 ( $t\text{-stat} > t\text{-tabel}$ ). Oleh karena itu, kita menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel IPM Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Nilai koefisien sebesar 5.084529 menunjukkan bahwa jika IPM naik sebesar 1%, maka akan diikuti oleh adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.084529 %.

#### 4.5 Pembahasan

Hasil estimasi yang dilakukan pada regresi dengan model Fixed Effect sebelumnya menunjukkan bahwa belanja langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan. Hal ini dikarenakan belanja langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah memang di alokasikan pada sektor yang produktif dan mampu untuk dirasakan langsung oleh masyarakat, baik lewat penyediaan infrastruktur berupa fasilitas sarana dan prasarana umum, pendidikan, dan juga kesehatan. Belanja yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut juga merupakan bentuk lain dari investasi pada bidang infrastruktur dan *human capital* di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013) dimana belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan membaiknya infrastruktur dan kualitas pelayanan publik diharapkan mampu untuk memudahkan dan meningkatkan aktivitas perekonomian di Pulau Jawa, sehingga memiliki pengaruh langsung yang akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi yang dilakukan pada regresi dengan model Fixed Effect sebelumnya menunjukkan bahwa belanja tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak signifikan. Hal ini dikarenakan belanja tidak langsung tidak sepenuhnya dikeluarkan untuk bidang yang produktif. Alokasi belanja tidak langsung di daerah lebih ke arah diperuntukkan bagi komponen-komponen seperti gaji pegawai, belanja bantuan sosial, hibah, dan komponen lain yang tidak berdampak langsung dan produktif untuk memacu perekonomian.

Hasil estimasi yang dilakukan pada regresi dengan model Fixed Effect sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan tidak signifikan. Hal ini dikarenakan penduduk sebagai salah satu faktor penting dalam produksi untuk meningkatkan perekonomian. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terkendali akan mendorong permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa didalam perekonomian. Hal tersebut tentunya akan berimplikasi positif, dimana penduduk sebagai konsumen yang mampu untuk mendorong tingkat konsumsi yang jauh

lebih tinggi. Selain itu, penduduk juga merupakan sumber daya yang memiliki nilai investasi yang sangat baik didalamnya. Sebagai sumber dari tenaga kerja, dengan memiliki nilai produktivitas yang tinggi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arianto, dkk. (2015) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi yang dilakukan pada regresi dengan model Fixed Effect sebelumnya menunjukkan bahwa IPM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan. Hal ini dikarenakan IPM merepresantasikan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin tinggi pula kualitas individu berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan, dan juga pengeluaran. Investasi pada *human capital* terutama pada aspek pendidikan, akan menjadikan individu yang matang dan mampu untuk bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain, maupun negara lain. Hal tersebut dinilai mampu untuk meningkatkan kapabilitas dan produktifitas seseorang dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik daerah juga nasional. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nurmainah, S. (2013) dan Utami, F. P. (2020) dimana IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab IV, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Belanja Langsung berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan belanja langsung dialokasikan pada sektor produktif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.
2. Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan alokasi belanja tidak langsung memang lebih ke arah sektor yang tidak produktif bagi perekonomian.
3. Jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk merupakan faktor produksi yang penting, dimana penduduk mampu untuk meningkatkan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa.
4. IPM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan peningkatan kualitas sumber daya manusia berdampak pada peningkatan kemampuan seseorang dalam menopang aktivitas perekonomian.

#### **5.2 Saran**

1. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah sebaiknya bijak dalam membuat kebijakan dan merealisasikan alokasi anggaran belanja untuk meningkatkan pengadaan barang dan jasa. Karena baik secara langsung dan tidak langsung, agar setiap langkah yang dilakukan mampu untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan jumlah penduduk mampu untuk menopang pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengoptimalkan pengendalian tingkat kelahiran. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan pembangunan yang adil dan merata dan juga infrastruktur yang tidak



seimbang hanya akan menambah masalah baru terkait dengan kemiskinan dan juga ketimpangan.

3. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan manusia, dimana tingkat pendidikan yang semakin baik akan diiringi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang siap dan mampu untuk bersaing baik dalam skala nasional maupun internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, C. E., Sumarsono, S., & Adenan, M. (2015). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Azwar. (2016). Allocative Role of Government through Procurement of Goods/Services and Its Impact on Indonesian Economy. In *Kajian Ekonomi Keuangan* (Vol. 20, Issue 2).
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*.
- BPS. (2020). *Badan Pusat Statistik*.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia*.
- BPS. (2022). *[Seri 2010] Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (Persen), 2018-2020*.
- Digdowiseiso, K. (2021). Penelitian Terdahulu\_5. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi, 5(3), 2026–2038*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2011).
- Farel Maga, F., D. Tolosang, K., & L. Ch. Lopian, A. (2016). The Effect Of Direct Expenditure And Indirect Expenditure To The Economy In The Southern District Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(01)*.
- Fitri Yenny, N., & Anwar, K. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lhokseumawe.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics* (4th ed.). The McGraw–Hill Companies.
- Rudibdo H. S. (2017). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Eks- Karesidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Karya Teknik Sipil S1 Undip, 6(4), 1–14*.
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics*

- Development Analysis Journal*, 2(3). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Hellen, Mintarti, S., & Fitriadi. (2017). *Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja*. 13(1), 28–38.
- Kaat, M. H., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010–2015. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(6).
- Kuznets, S. (1973). Modern Economic Growth: Findings and Reflections. *The American Economic Review*, 63(3), 247–258.
- Mahdawi, Ratnawati, N., Saputra Jumadil, Ilham, R. N., Siahaan, R., Jayanti, S. E., Sinurat, M., & Nainggolan, P. (2021). The Effect of Population Growth on Economic Growth: An Evidence from Indonesia. *11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapore*, 7–11.
- Mankiw, N. G., & Ball, L. M. (2011). *Macroeconomics and the Financial System (2011)*.
- Mayer, S. E., Lopoo, L. M., & Groves, L. H. (2016). Government Spending and the Distribution of Economic Growth. *Southern Economic Journal*, 83(2), 399–415.
- Muafiqie, H. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Implikasinya Terhadap Distribusi Pendapatan Di Jawa Timur. *@Trisula*, 2(1), 24–24.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi kasus 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141.
- Pancawati, N. (2000). Pengaruh Rasio Kapital-Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stok Kapital Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pertumbuhan Gdp Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(2), 179–185.
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan

- Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Journal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7), 651–680.
- Ranis, G. (2004). *Human Development And Economic Growth*.
- Ratno, F. A. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Solo Raya 2009-2018. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 6(4), 362–376.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (4th ed.).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta.
- Sukirno, S. (2008). *Teori Pengantar Makro*. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A. B., & Rahmawati Lucky. (2013). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Pearson Education Limited.
- Todaro, M. P. (1977). *Development Policy and Population Growth: A Framework for Planners*. 3(1), 23–43.
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2).
- Widarjono, A. (1999). Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Analisis Kausalitas. *Jep*, 4(2).
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi*. (1th ed., Vol. 1). EKONSIA UII.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga*. Ekonesia

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Common effect Model (CEM)

`. reg log_pdrb log_BL log_BTL log_POP log_ipm`

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	1,232
Model	<b>656.083526</b>	<b>4</b>	<b>164.020881</b>	F(4, 1227)	=	<b>661.48</b>
Residual	<b>304.246448</b>	<b>1,227</b>	<b>.247959615</b>	Prob > F	=	<b>0.0000</b>
				R-squared	=	<b>0.6832</b>
				Adj R-squared	=	<b>0.6822</b>
Total	<b>960.329974</b>	<b>1,231</b>	<b>.780121831</b>	Root MSE	=	<b>.49796</b>

log_pdrb	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_BL	<b>.1793371</b>	<b>.0333781</b>	<b>5.37</b>	<b>0.000</b>	<b>.1138527</b>	<b>.2448215</b>
log_BTL	<b>-.0787501</b>	<b>.0288749</b>	<b>-2.73</b>	<b>0.006</b>	<b>-.1353997</b>	<b>-.0221005</b>
log_POP	<b>.9138067</b>	<b>.0247837</b>	<b>36.87</b>	<b>0.000</b>	<b>.8651836</b>	<b>.9624299</b>
log_ipm	<b>4.27142</b>	<b>.1857729</b>	<b>22.99</b>	<b>0.000</b>	<b>3.906952</b>	<b>4.635887</b>
_cons	<b>-21.36691</b>	<b>.8847311</b>	<b>-24.15</b>	<b>0.000</b>	<b>-23.10267</b>	<b>-19.63116</b>

## Lampiran 2 Fixed Effect Model (FEM)

```
. xtreg log_pdrb log_BL log_BTL log_POP log_ipm, fe
```

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =    1,232
Group variable: id                    Number of groups =    112

R-sq:                                  Obs per group:
    within = 0.7912                    min =          11
    between = 0.0564                   avg =         11.0
    overall = 0.0792                    max =          11

corr(u_i, Xb) = -0.1829                 F(4,1116)      =   1057.49
                                           Prob > F       =    0.0000
```

log_pdrb	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
log_BL	.0321203	.0068707	4.67	0.000	.0186393	.0456014
log_BTL	.0063139	.0074364	0.85	0.396	-.008277	.0209049
log_POP	.0349058	.0166753	2.09	0.037	.0021874	.0676242
log_ipm	5.084529	.1263054	40.26	0.000	4.836706	5.332352
_cons	-12.31286	.5120617	-24.05	0.000	-13.31757	-11.30815
sigma_u	.86184933					
sigma_e	.08291802					
rho	.99082864	(fraction of variance due to u_i)				

```
F test that all u_i=0: F(111, 1116) = 388.61      Prob > F = 0.0000
```



### Lampiran 3 Random Effect Model (REM)

```
. xtreg log_pdrb log_BL log_BTL log_POP log_ipm
```

```
Random-effects GLS regression           Number of obs   =    1,232
Group variable: id                     Number of groups =    112

R-sq:                                  Obs per group:
    within = 0.7868                      min =          11
    between = 0.1419                     avg =         11.0
    overall = 0.1665                      max =          11

corr(u_i, X) = 0 (assumed)              Wald chi2(4)    =   3512.14
                                           Prob > chi2     =    0.0000
```

log_pdrb	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
log_BL	.0354359	.0075612	4.69	0.000	.0206162	.0502555
log_BTL	.017904	.0080479	2.22	0.026	.0021305	.0336775
log_POP	.1099661	.0176081	6.25	0.000	.0754549	.1444773
log_ipm	4.78543	.1345152	35.58	0.000	4.521786	5.049075
_cons	-12.17849	.5555088	-21.92	0.000	-13.26727	-11.08971
sigma_u	.4532756					
sigma_e	.08291802					
rho	.96761992	(fraction of variance due to u_i)				



#### Lampiran 4 Hausman Test

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fe	(B) re		
log_BL	.0321203	.0354359	-.0033155	.0003721
log_BTL	.0063139	.017904	-.0115901	.0015385
log_POP	.0349058	.1099661	-.0750603	.0052468
log_ipm	5.084529	4.78543	.2990986	.0356762

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg  
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(4) = (b-B)'[(V\_b-V\_B)^(-1)](b-B)  
 = 219.59  
 Prob>chi2 = 0.0000

